

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) DARING / ONLINE

Sekolah : SMA N 2 PASAMAN
 Mata Pelajaran : Sejarah Indonesia
 Kelas/Semester : XII / Ganjil
 Materi Pokok : K.D. 3.5 Kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru
 Sub Materi : - Aksi Tritura
 - Lahirnya Supersemar
 - Dualisme Kepemimpinan Orde Lama
 Alokasi Waktu : 1 Minggu x 2 Jam Pelajaran @ 30 Menit Tatap Muka Virtual

A. Kompetensi Inti

- **KI-1 dan KI-2:** Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”.
- **KI 3:** Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- **KI4:** Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator
3.5 Menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis tuntutan bangsa Indonesia yang terwakili dalam aksi tritura • Merekonstruksi lahirnya Supersemar • Menampilkan dualisme kepemimpinan pada masa akhir orde lama • Berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas – tugas dalam pembelajaran sejarah
4.5 Melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penelitian sederhana tentang tuntutan aksi Tritura • Menyajikan hasil penelitian tentang Supersemar dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis • Menyajikan hasil penelitian dualism kepemimpinan pada masa akhir orde lama • Meneladani sikap jujur dan tanggung jawab, cinta damai, pada materi kehidupan politik masa orde baru

C. Tujuan Pembelajaran

- Melalui pengamatan di **Vidio di Youtube** singkat yang dibagikan tentang aksi Tritura, peserta didik dapat berdiskusi dan kerja kelompok di **Google classroom** agar peserta didik dapat Menganalisis tuntutan bangsa Indonesia yang terwakili dalam aksi tritura
- Melalui diskusi dan tanya jawab di **room diskusi**, serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat Merekonstruksi lahirnya Supersemar secara kritis dan mandiri dalam bentuk laporan Daring.
- Melalui **Google meet atau zoom** peserta didik dapat menyajikan hasil penggalan tentang dualisme kepemimpinan pada masa akhir orde lama

D. Materi Pembelajaran

- **Fakta**
 - Tritura
 - Supersemar
 - Dualisme kepemimpinan
- **Konsep**
 - Kehidupan Politik Dan Ekonomi Masa Orde baru

E. Metode Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran : Saintifik
Model Pembelajaran : Discovery Learning / Problem-based Learning / Berbasis Project-based Learning
Metode : Daring (Google Classroom, Google Meet, Zoom)

F. Media Pembelajaran

Media :

- Google Classroom, Zoom / Google Meet
- Worksheet atau lembar kerja (daring)
- Lembar penilaian Luring dan Daring

Alat/Bahan :

- Alat : Handphone, Laptop, Jaringan Internet

G. Sumber Belajar

- Buku Sejarah Indonesia Siswa Kelas XII, Kemendikbud, Tahun 2016, Halaman 47 – 73 dan Buku referensi yang relevan
- Power Point Sejarah Indonesia kelas XII, Kemdikbud (KD darurat Covid) dan
- Modul kelas XII, Kemdikbud tahun 2020 Darurat Covid (KD dan Indikator Esensial/penting)
- Laman Sumber : Link Google Drive /Grop WA-Link/URL, E-Modul, LMS Kelas Maya “Sicadiak Pandai” / Youtube.com dan daftar website referensi sejarah (<https://kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id/SiCadiakPandai/> - <https://classroom.google.com/h> - <https://drive.google.com/drive/> - <http://e-resources.perpusnas.go.id/> - [https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Sejarah-https://www.museumnasional.or.id/-](https://id.wikipedia.org/wiki/Portal:Sejarah-https://www.museumnasional.or.id/)
- Dll

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Pertemuan I (2 X 30 Menit)

Sintak (Langkah – Langkah Pembelajaran) Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)	
Orientasi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Guru meminta peserta didik untuk masuk ke room chat di Google Classroom atau Zoom / Google Meet yang telah dibuat dan disosialisasikan kepada peserta didik. ❖ Guru menyapa peserta didik yang telah masuk room dan mengecek jumlah siswa yang masuk di Google meet/ Zoom ❖ Melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan <i>syukur</i> kepada Tuhan YME dan berdoa untuk memulai pembelajaran Zoom/Google meet ❖ Guru melampirkan dan membagikan link/langsung di kolom chat dan mempersilahkan siswa untuk Presensi
Apersepsi	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Guru memberikan apersepsi awal tentang protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, dengan mengingatkan pakai masker dan sering cuci tangan dll. ❖ Guru mereview materi sebelumnya ❖ Guru Memberitahukan materi pelajaran esensial atau Darurat Covid yang akan dibahas pada pertemuan saat itu melalui Zoom/google meet ❖ Pembagian kelompok belajar menjadi 6 kelompok secara Daring dan melanjutkannya di room diskusi atau chat public Zoom
Kegiatan Inti (40 Menit)	
Stimulation (Stimulasi/ pemberian rangsangan)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Guru Menayangkan/ membagikan Link video di Zoom atau Google class demonstarsi menuntut Tritura pada masa akhir orde lama ❖ Guru membagikan Link atau E-Modul dan meminta peserta didik untuk membaca TAP. MPRS no. IX/ MPRS/1966, TAP. MPRS no. XIII/ MPRS/1966, TAP. MPRS no. XXXIII/ MPRS/1966
Problem statemen (Pertanyaan/ identifikasi masalah)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang disajikan dan hasil pengamatannya yang akan dijawab melalui kegiatan belajar
Data collection (Pengumpulan Data)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Peserta didik diminta masuk sesuai dengan kode kelompok masing masing (sesuai absensi yang telah dibuat guru) room tersendiri di Google Classroom ❖ Guru membagi tema masing-masing kelompok <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok 1 dan 4. Tuntutan masyarakat dalam Demonstrasi Tritura 2. Kelompok 2 dan 6. Kronologi lahirnya Supersemar 3. Kelompok 3 dan 5. Dualisme kepemimpinan pada akhir masa

	orde baru
Data processing (pengolahan Data)	❖ Peserta didik mendiskusikan dan mengolah data yang dikumpulkan
Verification (Pembuktian)	❖ Peserta didik dalam kelompok mengadakan pembuktian benar tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian diadakan pengecekan apakah masalah bisa terjawab atau tidak.
Generalization (Menarik kesimpulan)	❖ Kelompok mempersentasikan hasil diskusi dengan membuat kesimpulan yang dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk kejadian dan masalah yang sama langsung di Zoom/Google meet
Penutup (10 Menit)	
	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Siswa diberikan tugas melalui grup FB untuk dijawab masing masing menggunakan fasilitas google form dengan deadline yang ditentukan ❖ Sebelum mengakhiri pelajaran, peserta didik dapat ditanyakan tentang nilai-nilai apa saja yang didapat dari pelajaran hari ini. ❖ Guru menyampaikan salam dan menutup ruang Meeting

I. Penilaian Pembelajaran

Penilaian menggunakan **Google Form** untuk aktifitas dan penilaian laporan di **Padlet** serta kompetisi hasil dari **Quizizz**

Form Penilaian Sikap

NO	Nama Peserta Didik	Beryukur	Kerjasama	Tanggung Jawab	Cinta Damai	Jujur
1						
2						
3						
4						
5						

Kriteria :

- Beryukur : Berdoa sebelum belajar
- Kerjasama : Aktif dalam diskusi kelompok
- Tanggung jawab : Menyelaskan tugas kelompok
- Cinta Damai : Menghargai pendapat teman
- Jujur : Tidak mencontoh hasil teman, menuliskan buku sumber

Penskoran :

Skor 90-100 : selalu, 75-89 : sering, 60-74 : kadang-kadang, <60 : tidak pernah

Form Penilaian Pengetahuan :

No	Soal	Skor Max
1	Mengapa bisa terjadi demonstrasi besar-besaran pada tahun 1966 dengan tuntutan Tritura ?	
2	Buatlah kronologi lahirnya supersemar !	
3	Berilah bukti-bukti bahwa pada masa akhir orde lama ada dualism kepemimpinan !	

Penskoran

Skor Max : 100

Kunci Jawaban :

1. Karena keadaan ekonomi yang cukup memprihatinkan, misalnya adanya inflasi sampai 600%, keadaan politik yang kacau karena presiden Soekarno tidak mau membubarkan PKI
2. ..
3. Adanya TAP. MPRS no XXXII / MPRS / 1966 yang isinya menugaskan kepada jendral Soeharto untuk membentuk kabinet. Pada Kabinet hanya dibentuk untuk seorang presiden

Form Penilaian Keterampilan

No	Nama Peserta Didik	Mengamati	Menanya
1			
2			
3			
4			
5			

Kriteria :

Mengamati : Fokus pada kriteria yang diamati

Menanya : Kemampuan dalam mengajukan pertanyaan

Penskoran

90 – 100 : Mahir

75 – 89 : Bagus

50 – 74 : Cukup

< 50 : Kurang

J. Remedial dan Pengayaan

Remedial : Bagi Siswa yang belum tuntas mencapai KKM melalui PBM online terstruktur

Pengayaan : Pendalaman materi bagi siswa yang di atas KKM melalui PBM online terstruktur

Diketahui,
Kepala Sekolah SMA N 2 Pasaman

Simpang Empat, Juli 2020
Guru Bidang Studi,

GUSTIRIZAL, S.Pd
NIP. 197308062005011003

SANTIA ROSMAWATI, S.Pd

LAMPIRAN

TRITURA



Tri Tuntutan Rakyat (atau biasa disingkat **Tritura**) adalah tiga tuntutan kepada pemerintah yang diserukan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selanjutnya diikuti oleh kesatuan-kesatuan aksi yang lainnya seperti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI), serta didukung penuh oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Ketika gelombang demonstrasi menuntut pembubaran PKI semakin keras, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Keadaan negara Indonesia sudah sangat parah, baik dari segi ekonomi maupun politik. Harga barang naik sangat tinggi terutama Bahan bakar minyak (BBM). Oleh karenanya, pada tanggal 12 Januari 1966, KAMI dan KAPPI memelopori kesatuan aksi yang tergabung dalam Front Pancasila mendatangi DPR-GR menuntut Tritura. Isi Tritura adalah:

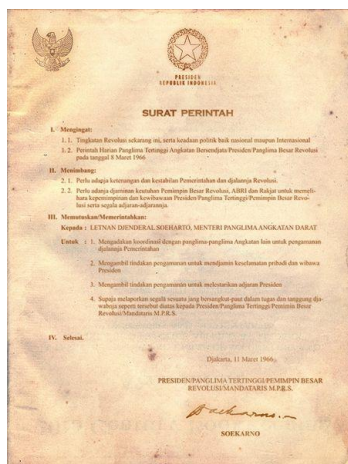
1. Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya
2. Perombakan kabinet Dwikora
3. Turunkan harga pangan

Tuntutan pertama dan kedua sebelumnya sudah pernah diserukan oleh KAP-Gestapu (Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan 30 September). Sedangkan tuntutan ketiga baru diserukan saat itu. Tuntutan ketiga sangat menyentuh kepentingan orang banyak.

Pada tanggal 21 Februari 1966 Presiden Soekarno mengumumkan reshuffle kabinet. Dalam kabinet itu duduk para simpatisan PKI. Kenyataan ini menyulut kembali mahasiswa meningkatkan aksi demonstrasinya. Tanggal 24 Februari 1966 mahasiswa memboikot pelantikan menteri-menteri baru. Dalam insiden yang terjadi dengan Resimen Tjakrabirawa, Pasukan Pengawal Presiden Soekarno, seorang mahasiswa Arif Rahman Hakim meninggal. Pada tanggal 25 Februari 1966 KAMI dibubarkan, namun hal itu tidak mengurangi gerakan-gerakan mahasiswa untuk melanjutkan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Rentetan demonstrasi yang terjadi menyuarakan Tritura akhirnya diikuti keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) oleh Presiden Soekarno yang memerintahkan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban

SUPERSEMAR



Surat Perintah Sebelas Maret atau **Surat Perintah 11 Maret** yang disingkat menjadi **Supersemar** adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini berisi perintah yang menginstruksikan Soeharto, selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu. Surat Perintah Sebelas Maret ini adalah versi yang dikeluarkan dari Markas Besar Angkatan Darat (AD) yang juga tercatat dalam buku-buku sejarah. Sebagian kalangan sejarawan Indonesia mengatakan bahwa terdapat berbagai versi Supersemar sehingga masih ditelusuri naskah supersemar yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di Istana Bogor.

Santia Rosmawati, S. Pd

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "*kabinet 100 menteri*". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima pasukan pengawal presiden Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "*pasukan liar*" atau "*pasukan tak dikenal*" yang belakangan diketahui adalah Pasukan Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke Bogor. Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat peristiwa G-30-S itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejangalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat. Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu mengendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal sebagai **Surat Perintah Sebelas Maret** yang populer dikenal sebagai **Supersemar** yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, di mana saat itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966 sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI disiapkan dan harus selesai malam itu juga.

Permintaan itu atas perintah Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai Supersemar itu tiba. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar "*Lho ini kan perpindahan kekuasaan*". Tidak jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana karena pelaku sejarah peristiwa "*lahirnya Supersemar*" ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan dalam sebuah bank.

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada

malam hari tanggal 11 Maret 1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M. Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta Brigjen M. Panggabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno menandatangani surat itu yang menurutnya itulah *Surat Perintah Sebelas Maret* yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk menurunkan pistolnya dan menyarungkannya.

Menurutnya, Presiden kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa ia harus keluar dari istana. "*Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus hati-hati,*" ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu, Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah peristiwa itu.

- Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "*A.M Hanafi Menggugat Kudeta Soeharto*", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud, M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu, Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor, menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat, pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta izin untuk datang ke Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan, sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yang datang ke Istana Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.
- Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

- Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, ANRI telah berkali-kali meminta kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha ANRI itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap.

DUALISME KEPEMIMPINAN DI AKHIR ORDE LAMA



Dualisme kepemimpinan nasional Di awal 1966, kondisi politik bergejolak. Soekarno diprotes keras karena G30S dan perekonomian yang memburuk. Puncaknya, pada 11 Maret 1966. Demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran terjadi di depan Istana Negara. Demonstrasi ini didukung tentara. Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto pun meminta agar Soekarno memberikan surat perintah untuk mengatasi konflik apabila diberi kepercayaan. Maka, pada 11 Maret 1966 sore di Istana Bogor, Soekarno menandatangani surat perintah untuk mengatasi keadaan

Surat itu dikenal sebagai Supersemar. Isinya, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk: Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Pimpinan Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS, demi untuk keutuhan Bangsa dan Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi. Mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan Panglima-Panglima Angkatan Lain dengan sebaik-baiknya. Supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan paut dalam tugas

dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Soeharto memimpin pemerintahan Supersemar bertujuan mengatasi situasi saat itu. Pada praktiknya, Setelah mengantongi Supersemar, Soeharto mengambil sejumlah keputusan lewat SK Presiden No 1/3/1966 tertanggal 12 Maret 1966 atas nama Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/PBR. Keputusan tersebut yakni: Pembubaran PKI beserta ormasnya dan menyatakannya sebagai partai terlarang Penangkapan 15 menteri yang terlibat atau pun mendukung G30S Pemurnian MPRS dan lembaga negara lainnya dari unsur PKI dan menempatkan peranan lembaga itu sesuai UUD 1945. Baca juga: Supersemar, Tonggak Lahirnya Orde Baru Soekarno yang diasingkan tak bisa berbuat banyak. Sementara Soeharto mendapat kekuasaan yang semakin besar.

Dikutip dari Hari-hari Yang Panjang: Transisi Orde Lama Ke Orde Baru, Sebuah Memoar (2008), dualisme kepemimpinan memunculkan polarisasi. Ada yang setuju dengan Soeharto untuk membubarkan. Namun ada juga yang masih setia kepada Soekarno. Soekarno terdesak Memasuki pertengahan 1966, masalah dualisme kepemimpinan nasional makin terasa. Soekarno tidak lagi bisa mencabut Supersemar ketika MPRS memutuskannya sebagai TAP MPRS Nomor IX/1966 pada 21 Juni 1966. Saat itu, MPRS mencabut Soekarno sebagai presiden seumur hidup sekaligus memberi kewenangan Soeharto sebagai pengembal Supersemar untuk membentuk kabinet pada 5 Juli 1966. Pada 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di Sidang MPRS. Soekarno dianggap mengecewakan.

Dalam pidato itu, Soekarno bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Pidato yang dikenal sebagai Nawaksara ini ditolak oleh MPRS. Kemudian pada 10 Januari 1967, Soekarno mengirim surat kepada Ketua MPRS Jenderal AH Nasution. Surat yang bernama "Pelengkap Nawaksara" itu berisi kurang lebih sama dengan Nawaksara. Soekarno kembali menyampaikan beberapa alasan terjadinya peristiwa G30S atau yang disebutnya dengan Gestok (Gerakan 1 Oktober). Sebulan kemudian, pada 7 Februari 1967, Soekarno kembali mengirim surat, kali ini untuk Soeharto. Dalam surat itu, Soekarno menyatakan akan menyerahkan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan itu terjadi pada 22 Februari 1967. Soekarno menyampaikan kepada menteri-menteri di Istana Merdeka. Malam harinya, Menteri Penerangan BM Diah membacakan pengumuman Soekarno. Baca juga: Demokrasi Indonesia Periode Orde Baru (1965-1998) Tak lama kemudian, MPRS mencabut kekuasaan Presiden Soekarno dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ketetapan itu tertuang dalam TAP MPRS Nomor XXXIII/1967.

